



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : 7/HK.03.2.Kpt/35/Prov/VI/2021

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan proses reformasi birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, maka perlu menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46.1/HK.03.1-Kpt/35/Prov/IV/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 788/Kpts/KPU-Prov/XII/2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 7/Kpts/KPUProv/VI//2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020-2024

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi:

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 02/Hk.03.1-Kpts/PROV/I/TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan antara lain :

- a. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
- b. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surabaya

Pada Tanggal : 2 Juni 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,**

ttd.

CHOIRUL ANAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

Sekretaris

Nanik Karsini



RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2021

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Manajemen Perubahan	1. Perencanaan Reformasi Birokrasi	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur. Tim Terdiri dari : 1) Tim Pengarah; 2) Tim Pelaksana (8 Area Perubahan); 3) Tim Agen Perubahan 4) Tim Assessor	Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				✓						✓							
			2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Kegiatan kick off / Pembangunan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur & Kabupaten/Kota						✓							
			3. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur	Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur					✓								
	Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media		1. Tersedianya media sosialisasi RB di lingkungan kerja yang bisa diakses stakeholder internal dan eksternal;						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2. Pembangunan kolom Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Jawa Timur di website resmi yang berisikan dokumentasi/pelaporan pelaksanaan RB di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur;								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

jdih.kpu.go.id/jatim

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1		3	4	5														18
			2. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	1. Pemberian pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun									✓					
				2. Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			3. Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja: 1) Penandatanganan Pakta integritas Penyelenggara Pemilu; 2) Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun; 3) Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan 4) Pembangunan Zona Integritas	1. Persentase (%) penandatanganan Pakta Integritas baik Anggota dan ASN 2. Persentase (%) pelaporan LHKPN 3. Persentase (%) pelaporan LHKASN 4. Dokumen Laporan penanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi : a). Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan b). Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan c). Deklarasi pencanangan Zona Integritas KPU Provinsi Jawa Timur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			4. Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur	1. Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur; 2. Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			5. Pembangunan instrumen reward dan punishment yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik;	1. Tersedianya instrumen reward and punishment di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur; 2. Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja;								✓					✓	

idih.kpu.go.id/jatim

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5													18
		3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1. Melakukan Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja. 2. Melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja melalui Lembar Kerja Evaluasi Unit (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan unit)	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan. 1. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja 2. Tersinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit					✓				✓			✓	
										✓			✓			✓	
										✓						✓	
			3. Melakukan pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan kerja kepada: 1) Tim pengarah 2) Tim Reformasi Birokrasi KPU 3) Kementerian PANRB melalui aplikasi PMPRB online bagi unit/satuan kerja yang ditunjuk sebagai sampel	1. Tim RB KPU RI menerima pelaporan: a). SK Tim RB, Tim Agen Perubahan, dan Assessor; b). Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan unit kerja/ satuan kerja c). Lembar Kerja Evaluasi (LKE Unit); d). Tersinya LKE Unit di aplikasi PMPRB Online bagi unit/satuan kerja yang ditunjuk sebagai sampel. 2. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja, serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya;		✓				✓							
										✓							
2	Penguatan Peraturan Perundang-Undangan/ Dereglasi Kebijakan	1. Evaluasi secara berkala produk peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan) yang menjadi kewenangan di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur	Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur	Adanya data perundang undangan di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5													18
		2. Menyempurnakan/ mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang- undangan lain;	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan unit dan satuan kerja	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di Revisi							✓	✓	✓	✓	✓	✓	
												✓	✓	✓	✓	✓	
												✓	✓	✓	✓	✓	
												✓	✓	✓	✓	✓	
												✓	✓	✓	✓	✓	
3	Penguatan Kelembagaan	3. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang- undangan yang dipandang menghambat pelayanan;	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan unit dan satuan kerja kepada stakeholder;	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder yang sudah di Revisi													
3	Penguatan Kelembagaan	4. Merumuskan berbagai peraturan perundang- undangan baru yang dipandang diperlukan;	Penyusunan naskah dinas pengaturan dan atau naskah dinas penetapan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan unit dan satuan kerja	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di sahkan.													
3	Penguatan Kelembagaan	5. Pengelolaan JDIH	1. Pembangunan JDIH Satuan Kerja 2. Pengelolaan JDIH Satuan Kerja	1. Dapat diaksesnya JDIH Satuan Kerja 2. Updatenya data JDIH Satuan Kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Penguatan Kelembagaan	1. Evaluasi Organisasi	1. FGD Evaluasi Organisasi di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur 2. Pengisian Kuesioner Evaluasi Organisasi	1. Dokumentasi laporan FGD Evaluasi Organisasi; 2. Pelaporan Kuesioner Evaluasi Organisasi kepada KPU RI								✓					
3	Penguatan Kelembagaan	2. Penyesuaian SOTK	1. Dilaksanakannya Penyesuaian SOTK unit/Satuan Kerja sesuai mandat. 2. Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi unit/satuan kerja	1. SOTK unit/Satuan Kerja sesuai mandat. 2. Struktur Organisasi unit/satuan kerja							✓	✓	✓	✓	✓	✓	Menunggu KPU RI
4	Penguatan Tataaksana	1. Peningkatan tatalaksana proses bisnis serta SOP di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur	1. Penyusunan peta proses bisnis dan SOP di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur;	1. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis; 2. Tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;						✓						✓	

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	3. Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi; dan						✓							✓	
				4. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja;							✓							✓	
			2. Evaluasi proses bisnis dilingkungan unit/satuan kerja;	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi							✓							✓	
			3. Penyusunan SOP di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur	1. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP							✓								
				2. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP;							✓								
				3. SOP sudah dilegalikan; dan							✓								
				4. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.							✓								
			4. Evaluasi SOP di lingkungan unit/satuan kerja	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti							✓							✓	
	2. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Tata kelola PPID di lingkungan Unit/Satuan Kerja: 1). Penyampaian Kebijakan/ Maklumat Layanan/ Standar Pelayanan/SOP PID di lingkungan satuan kerja 2). Peningkatan kapasitas pengelola PPID di lingkungan satuan kerja; 3). Pengelolaan PPID dan e- PPID di lingkungan satuan kerja; 4). Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID dan e-PPID 5). Survei kepuasan pemohon informasi	1. Adanya kebijakan pendukung PID;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. Dapat diaksesnya Maklumat Layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait permohonan informasi oleh stakeholder;			✓																
3. Meningkatnya kepuasan layanan PID;								✓											
4. Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindak lanjuti;				✓															
5. Jumlah sengketa informasi;				✓															
6. Adanya rekomendasi/pelaksanaan aan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID; dan				✓															

idih.kpu.go.id/iatim

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5													18
				7. Indeks kepuasan permohonan informasi.						✓							
				1. Kebijakan internal tata kelola SPBE						✓							
				2. Kebijakan internal layanan SPBE (SOP)						✓							
				3. Dimanfaatkannya aplikasi yang dibangun, memiliki proses bisnis dan SOP;						✓							
				4. Besaran anggaran belanja TIK di lingkungan unit/satuan kerja;						✓							
				5. Jumlah aplikasi terintegrasi di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur					✓								
				6. Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dimanfaatkan					✓								
				1. Jumlah dan jenis Naskah Dinas yang sudah dimanfaatkan;					✓								
				2. Data pemanfaatan aplikasi Manajemen Kepegawaian.					✓								
				3. Terisnya data aplikasi Manajemen Perencanaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				4. Terisnya data aplikasi Penganggaran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				5. Terisnya data aplikasi Manajemen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				6. Terisnya aplikasi manajemen kinerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				7. persentase (%) Pengadaan melalui aplikasi pengadaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				1. Dapat diaksesnya aplikasi pengadaan oleh publik, SOP dan jumlah pengadu/laporan;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2. Aplikasi Dokumentasi Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja (JD/H Sekretariat) yang selalu diperbaharui;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				3. Dapat diaksesnya WBS oleh stakeholder, SOP dan Jumlah pelapor/Laporan Pengadaan;							✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5													18
				4. Jumlah jumlah aplikasi Kepemiluan yang dimanfaatkan, serta: 1) Data pengunjung bagi aplikasi yang bisa diakses publik 2) Indeks Survei Kepuasan Publik terhadap aplikasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				5. Jumlah pemohon melalui aplikasi PPID Satuan kerja oleh publik.		✓											
				1. Terkelolanya arsip statis,dinamis, manual dan digital di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2. Terkelolanya arsip statis dan dinamis di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				3. Terdokumentasinya arsip vital	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				4. Jumlah pemangku jabatan yang berstatus JF Arsiparis							✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				1. Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai	✓						✓					✓	
				2. Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target output/mutu/waktu/biaya	✓						✓					✓	
				3. Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara bejenjang/ Cascading	✓						✓				✓		
				4. Pengukuran periodik Sasaran kinerja Individu	✓						✓					✓	
				5. Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP	✓						✓					✓	
				6. Penilaian Kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment	✓						✓					✓	
				1. Data Mutasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2. Data Promosi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				3. Data Peserta Assessment	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		3. Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu		1. Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18
				2. Jumlah Pelanggaran tahun ini	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				3. Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			4. Perencanaan kebutuhan/ penambahan Jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN menggunakan Analisa Beban Kerja (ABK)	Tersedianya dokumen Analisis Beban Kerja						✓						✓	
				1. Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan unit kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2. Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				6. Implementasi Standar Kompetensi Jabatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2. Profesionalisme ASN	7. Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian	Pembangunan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan unit/satuan kerja.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung unit dan satuan kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Renstra satuan kerja	✓					✓							
		1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Penyusunan dan penetapan Renstra Satuan Kerja	Renstra hasil reviu						✓							
				1. Adanya dokumen penetapan Kinerja hingga level Eselon IV	✓						✓					✓	
			2. Reviu Renstra Satuan Kerja	2. % Capaian kinerja merupakan unsur pemberian Reward & Punishment	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				3. Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan penentuan kinerja seluruh pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5													18
			4. Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	1. Adanya Program dan kegiatan: 1) Jumlah program 2) Jumlah kegiatan 3) Jumlah program yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi 4) Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2. Persentase sasaran Kinerja: 1) Jumlah Sasaran Kinerja 2) Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				3. Persentase Anggaran yang berhasil difocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi: 1) Jumlah anggaran total 2) Jumlah anggaran yang berhasil difocussing	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			5. Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			6. Pengukuran Capaian Kinerja Unit/Satuan Kerja	% Capaian kinerja unit/satuan kerja			✓			✓			✓			✓	
			7 Evaluasi Capaian Kinerja Unit/Satuan Kerja	1. Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja unit/satuan kerja			✓			✓			✓			✓	
				2. Reviu Laki unit/satuan kerja						✓							
			8. Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja	Pelaporan kinerja unit/satuan kerja tepat waktu		✓											
		2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E- Lapkin;	1. Terisnya aplikasi e- Lapkin	✓		✓			✓			✓			✓	
				2. Data e-Lapkin unit/satuan kerja termutakhir						✓						✓	
			2. Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas Kinerja; dan	1. % jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan							✓					✓	
				2. Pengelola PPBJ bersertifikat			✓										

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3. Pembangunan Jabatan Fungsional yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja: 1) JF Analis Pengelola Keuangan APBN 2) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 3) JF Perencanaan	5 1. % Pengelola Keuangan yang berstatus JF Pengelola Keuangan APBN 2. % Pengelola PBJ yang berstatus JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 3. % Pengelola perencanaan yang berstatus JF Perencanaan			✓										
										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.	Penguatan Pengawasan	1. Pembangunan Zona Integritas di unit/satuan kerja	1. Pencanaan Zona Integritas di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur; 2. Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur;	1) Terbentuknya Tim Zona integritas; 2) Di tandatanganinya Piagam integritas oleh para pihak dan saksi; 3) Masuknya unit kerja/satuan kerja dalam penilaian WBK/WBBM; 4) Adanya Rencana kerja Zona Integritas yang sudah dilegalakan.					✓								
										✓							
										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			3. Pelaksanaan Rencana Aksi Zona Integritas	1. Dokumentasi kegiatan yang terlaksana dari 6 Area Zona Integritas di dalam Rencana Aksi Zona Integritas; dan 2. % Kegiatan yang terlaksana di dalam Rencana Aksi Zona Integritas					✓		✓			✓		✓	
			4. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur.	1. Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan Zi 2. % pelaksanaan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi atas rencana kerja pembangunan Zi 3. Melaporkan pembangunan Zi dengan didasarkan pada rencana kerja yang sudah dilegalakan					✓		✓			✓		✓	
			5. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE Zi)	1. Tersinya LKE Zi; dan 2. Tersinya PMPRB Zi bagi unit/satuan Kerja yang di tunjuk Adanya UPG di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur					✓							✓	
		2. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Jawa Timur	1. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG); 2. Pembangunan komitmen dan Diseminasi atas peraturan gratifikasi;	1. Adanya alat sosialisasi di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur.					✓		✓	✓		✓	✓	✓	

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5													18
				2. Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan unit/satuan kerja; dan					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				3. Tanda tangan komitmen anti gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur;	✓												
			3. Public Campaign Anti Gratifikasi	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal;					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			4. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem pengendalian gratifikasi	1. Laporan pengendalian gratifikasi												✓	
				2. Tindak lanjut Pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			3. Pelaksanaan Whistle Blowing System KPU	1. Tersedianya aplikasi WBS yang bisa diakses oleh publik							✓						
				2. Adanya SOP WBS					✓								
				3. Adanya Pengelola WBS					✓								
			2. Pengelolaan WBS di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur	Prosentase Pengaduan WBS selesai ditindaklanjuti												✓	
			3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan WBS di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur	Laporan pengelolaan WBS di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur					✓				✓			✓	
			4. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU	1. Identifikasi Benturan Kepentingan di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur						✓						✓	
				2. Penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan bagi Anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur	% Penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan dari identifikasi benturan kepentingan;				✓								
			3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut atas Pengelolaan Benturan Kepentingan.	Dokumen laporan monitoring, evaluasi pengelolaan Benturan Kepentingan.					✓							✓	
			5. Peningkatan SPIP di lingkungan unit/satuan kerja	1. Pembangunan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) di lingkungan Unit/Satuan Kerja	✓												

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2. Pelaksanaan SPIP:	Terselenggaranya:													
			1) Lingkungan pengendalian	1) Lingkungan pengendalian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			2) Penilaian risiko	2) Penilaian risiko													
			3) Kegiatan pengendalian	3) Kegiatan pengendalian													
			4) Informasi dan komunikasi	4) Informasi dan komunikasi													
			5) Pemantauan pengendalian intern	5) Pemantauan pengendalian intern													
			3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan SPIP	Pelaporan Buku Kendali tepat waktu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		6. Penanganan pengaduan masyarakat KPU	1. Pembangunan Sistem Pengaduan masyarakat di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur	1. Tersedianya sarana penyampaian pengaduan;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2. Adanya pejabat yang mengelola pengaduan;													
				3. Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan;													
				4. Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan;													
			2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur:	Prosentase Pengaduan Masyarakat selesai ditindaklanjuti				✓								✓	
			3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur	Laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian, hambatan dan rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat				✓							✓		
		7. Peningkatan Integritas Individu	1. Penyampaian LHKPN	100% seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur			✓										
			2. Penyampaian LHKASN	100% seluruh wajib lapor LHASN di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur			✓										
		8. Peningkatan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa	1. Pembangunan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Adanya struktur pengelola Pengadaan Barang/jasa di lingkungan unit/satuan kerja.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			2. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Prosentase pelaksanaan pengadaan sesuai perpres 16 Tahun 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan pengadaan barang/jasa												✓	

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1				5															18
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Penguatan pelayanan prima di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur	4 Memetakan jenis-jenis/ produk-produk pelayanan Administrasi Internal Kesekretariatan dan pelayanan eksternal (terkait Kepemiluan) Melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis layanan baik internal dan eksternal terhadap 14 komponen standar pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 meliputi: 1) Dasar hukum; 2) Persyaratan Layanan; 3) Sistem, mekanisme dan prosedur layanan; 4) Jangka waktu penyelesaian layanan; 5) Biaya/tarif; 6) Produk layanan; 7) Saran, prasarana dan/atau fasilitas; 8) Kompetensi pelaksana 9) Pengawasan internal; 10) Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 11) Jumlah pelaksana; 12)Jaminan pelayanan; 13)Jaminan keamanan; 14)Evaluasi kinerja pelaksana; Tools evaluasi menggunakan	5 Informasi jenis-jenis atau produk-produk layanan di lingkungan unit/satuan kerja baik kepada internal dan eksternal; 1. Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi terhadap setiap jenis layanan internal dan eksternal/ upaya pemenuhan terhadap 14 komponen standar pelayanan (reviu dan perbaikan standar pelayanan). 2. Sudah adanya maklumat pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja 3. Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan; 4. Jumlah sengketa pelayanan menurun; 5. Menurunnya jumlah pemagnggaran kode etik ASN dan Kode etik Penyelenggara pemilu; 6. Adanya akses pengaduan, konsultasi serta Pengelolaan pengaduan masyarakat (jumlah pengaduan masuk, sedang proses dan selesai) 7. Adanya inovasi pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh stakeholder internal dan/atau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2. Mendorong Inovasi di sektor pelayanan kepemiluan dan administrasi di lingkungan unit/satuan kerja.	Menciptakan/Melakukan deregulasi pelayanan/menerapkan inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan dalam hal: 1) Kesesuaian Persyaratan 2) Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3) Kecepatan Waktu Penyelesaian 4) Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis/Berbayar 5) Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6) Kompetensi Pelaksana 7) Perilaku Petugas 8) Kualitas Sarana dan prasarana 9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1) Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan; 2) Adanya regulasi/deregulasi kebijakan pelayanan; 3) Adanya SOP Pelayanan 4) Informasi kepada publik terkait biaya layanan 5) Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja baik kepada internal dan eksternal; 6) Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

idih.kpu.go.id/iatim

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1		3	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			8. Visi, Misi dan Motto Pelayanan: a) Ketersediaan visi dan misi pelayanan b) Ketersediaan moto pelayanan	9. Atribut layanan dapat terlihat publik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			9. Atribut Pelayanan: a) berupa kartu identitas petugas; b) Kartu tamu; c) Buku tamu; d) Petunjuk arah ruang layanan	10. Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan unit/satuan kerja;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		4. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik;	1. Pembangunan Kerja Sama 2. Peilbatan masyarakat dalam kegiatan pemilu						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		5. Penerapan reward and punisment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;	Pembangunan dan pelaksanaan reward dan punishment dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya pemberian reward dan punnismment dalam pelayanan									✓				

Surabaya, 2 Juni 2021
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

CHOIRUL ANAM

